

Peran Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam

Endang Susanti

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: endangsusanti311@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini akan mengeksplorasi tentang bagaimana peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam. Problematika terkait kemiskinan menjadi problem yang sangat urgen untuk segera diselesaikan dan pemerintah mengambil peran penting dalam penyelesaian problem tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis-deskriptif dengan didasarkan pada studi literatur yang terfokus pada problem kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dihasilkan fakta bahwa kebijakan pemerintah melalui program P3KE telah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yakni aspek keesaan Tuhan, keadilan, tanggungjawab moral, dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Akan tetapi, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan dana, infrastruktur, akses terhadap kesehatan dan pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam rangka mengatasi problem tersebut pemerintah perlu meningkatkan integrasi program hingga ke tingkat desa dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pemerintah, Peran, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang ditakuti setiap negara berkembang, termasuk juga negara Indonesia (Sulastomo, 2011:14). Pasalnya ketika kemiskinan itu melanda suatu negara maka dapat dipastikan kesejahteraan masyarakatnya juga akan terhambat. Suatu negara sendiri dapat dikatakan maju apabila kesejahteraan masyarakatnya telah terpenuhi dan permasalahan terkait kemiskinan telah terentaskan. Problem terkait kemiskinan ini sebenarnya suatu problem yang sangat serius yang harus segera ditanggulangi dan bahkan seharusnya harus segera dihilangkan.

Kemiskinan bukan merupakan permasalahan pribadi seseorang, golongan maupun pemerintah saja, akan tetapi kemiskinan merupakan permasalahan dari setiap warga negara Indonesia. Karenanya diperlukan kerjasama antar semua golongan baik itu masyarakat maupun pemerintah. Dampak yang dapat ditimbulkan dari

kemiskinan ini juga beragam, selain itu kemiskinan dapat membuat seseorang dapat melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup termasuk juga dengan melakukan kejahatan kriminal seperti mencuri bahkan membunuh seseorang. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan kegelisahan bagi setiap warga negara.

Seseorang dapat dikatakan miskin apabila kebutuhannya tidak terpenuhi baik itu kebutuhan fisik, mental maupun sosial. Ketika kebutuhan dasar seseorang tersebut tidak terpenuhi maka akan dapat menyebabkan anggota keluarga ikut terlantar dan lebih parahnya mengalami ketunaan sosial. Rumah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya harus terpenuhi, meskipun tingkat urgensinya masih di bawah sandang dan pangan. Hal ini tentu juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan atensi dari pemerintah, sebab menjamin

kesejahteraan masyarakatnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki keterikatan dengan dunia perekonomian sebab hal tersebut merupakan fitrah manusia untuk bertahan hidup (Johan, 2009:31). Suatu negara dikatakan maju apabila sektor perekonomiannya berjalan dengan stabil disektor formal maupun informal, kondisi perekonomian tersebut menjadi aspek penting dalam menunjang kemajuan negara. Tentu pemerintah ikut mengambil peran dalam memastikan perekonomian negara berjalan dengan stabil.

Dalam ekonomi Islam terdapat satu prinsip penting yakni kehidupan ekonomi masyarakat dapat pula diatur oleh negara karena kepemilikan wewenang dan kekuasaan. Secara tidak langsung negara ikut bertanggungjawab dalam memelihara masyarakatnya dan memenuhi sarana dalam memenuhi standar kehidupan yang layak bagi setiap masyarakatnya. Lahirnya otonomi daerah menjadi harapan bagi pemerintah juga masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah yang mana hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Meskipun ujung tombak dari pengentasan kemiskinan adalah masyarakat itu sendiri, namun peran pemerintah juga memiliki pengaruh yang besar sebab dalam hal ini pemerintah mengatur kebijakan masalah pembangunan. Selain itu, pemerintah juga mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan rancangan pembangunan itu sendiri.

Dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian dan pengentasan kemiskinan maka dibutuhkan pengawasan/pengaturan oleh pemerintah, karenanya dalam hal ini, pemerintah berperan

sebagai pengendali juga pengawas terhadap produksi, distribusi dan komoditas.

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bank Dunia dalam laporannya berjudul “Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security” mencatat hingga tahun 2022 angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sejumlah 1,5 % (The World Bank, 2023:6). Hal tersebut memberi harapan bahwa tujuan pemerintah Indonesia untuk memberantas kemiskinan akan lebih cepat dari target yang diharapkan tahun 2024. Sedangkan data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36% mengalami penurunan 0,21 % dari September 2022 dan menurun 0,18% dari Maret 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023). Meskipun telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun angka tersebut masih tergolong cukup tinggi dan perlu usaha yang gigih untuk mengentaskan kemiskinan tersebut.

Problematika terkait kemiskinan menjadi problem yang sangat urgen untuk segera diselesaikan dan pemerintah mengambil peran penting dalam penyelesaian problem tersebut. Di sisi lain, ekonomi Islam hadir sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai agama dalam hal ekonomi. Berangkat dari problematika tersebut, kajian ini akan membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan perspektif ekonomi Islam dan bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan perspektif ekonomi Islam.

STUDI PUSTAKA

Penelitian terkait peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan memang sudah banyak diteliti. Namun yang membahas terkait bagaimana peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam masih sedikit ditemukan. Adapun beberapa penelitian yang dinilai berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut;

Penelitian serupa dilakukan oleh Nina Herlina dan Mamay Komariah dalam Jurnal Volume 5 No. 2 September 2017 dengan judul Peran Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis (Herlina & Komariah, 2017:260). Dalam penelitian ini Nina berhasil menarik kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ciamis dapat dilihat dari dibentuknya LTPKD (Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah). Selain itu, upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan yakni dengan mengeluarkan regulasi mengenai pengentasan kemiskinan. Penelitian ini hampir serupa, namun yang membedakan adalah penggunaan perspektif ekonomi Islam dan lokus penelitiannya juga berbeda.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Samud dengan Judul Peranan Pemerintah dalam Menyejahterakan Masyarakat melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam yang dipublish dalam Jurnal Al-Amwal Volume 10 No. 2 Tahun 2018 (Sumud, 2018:215). Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki peran yang penting dalam mencapai kesejahteraan. Keduanya harus saling membantu dan menjaga koordinasi agar program-programnya dapat terlaksana dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini hampir sama dengan konsep peneliti dimana

mencoba mencari bagaimana peran pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam, sedangkan dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Penelitian terkait juga dilakukan oleh Muhamad Aqim Adlan dengan judul Peran Pemerintah dalam menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Era Pandemi Covid-19 (Sebuah Kajian dalam Perspektif Ekonomi Islam) yang dipublis dalam Jurnal Ekonomi Syariah Volume 08, Nomor 01 April 2021 (Adlan, 2021:81). Dalam penelitian ini berhasil memperoleh data bahwa dalam usaha menyelamatkan UMKM di Era Pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia memberikan bantuan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM serta memberikan sarana kartu pra kerja sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap peningkatan perekonomian masyarakatnya. Langkah dan peran pemerintah dalam problem ini dalam perspektif ekonomi Islam merupakan salah satu realisasi dari nilai-nilai fundamental dari ekonomi Islam yaitu untuk mewujudkan keadilan, bentuk tagging jawab dan sarana pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dan juga kemaslahatan bersama. Hal ini hampir serupa dengan penelitian ini namun dalam karya Aqim lebih terfokus pada penyelamatan UMKM saat Era Pandemi sedangkan dalam penelitian ini fokus pengentasan kemiskinan.

Penelitian terkait kemiskinan yang dilihat dari perspektif ekonomi Islam juga dilakukan oleh Umaima dengan judul artikel "Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Ekonomi Islam) yang dipublis pada jurnal Diktum Volume 12 Nomor 2 Tahun 2014 (Umaima,

2014:179). Artikel karya Umaima ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif bersifat analisis deskriptif. Secara garis besar penelitian ini akan mengkaji secara mendalam terkait bagaimana pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dalam Islam pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk ikut campur dalam hal kehidupan ekonomi setiap warganya. Dalam hal ini pemerintah harus dapat mengimplementasikan prinsip jaminan sosial dan keseimbangan sosial agar kemaslahatan umat dapat tercapai. Dilihat dari pembahasannya, artikel ini sangat relevan dengan penelitian ini karena membahas terkait peran ataupun tanggung jawab pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang ditinjau dari ekonomi Islam.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah terurai di atas, telah ditemukan beberapa persamaan dalam pembahasan peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan perspektif ekonomi Islam. Dari masing-masing literature review tersebut memiliki kesenjangan atau gap-nya masing-masing baik itu dari penggunaan perspektif maupun fokus kajiannya. Selain daripada itu, penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat library research. Data primer dalam

penelitian diperoleh dengan melakukan kajian teori dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel maupun hasil penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan topik yang dibahas penulis (Zed, 2009:3). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data analitis-kritis (Mukhtar, 2013:28) terhadap peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan perspektif ekonomi Islam

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang sangat ditakuti setiap orang, bahkan di dunia ini tentu tidak ada orang yang ingin hidup miskin dan kekurangan. Pasalnya ketika seseorang tersebut masuk dalam kategori miskin maka tentu ada beberapa kebutuhan dasar kehidupannya yang tidak terpenuhi baik itu kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Problem terkait kemiskinan ini bukanlah menjadi tanggung jawab atau urusan pribadi seseorang saja, akan tetapi pemerintah juga memiliki peran yang cukup penting dalam mencegah dan mengentaskan adanya kemiskinan ini. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memastikan apakah masyarakatnya telah memperoleh kesejahteraan atau belum.

Dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan, maka antara pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama dengan baik. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat mau mematuhi kebijakan atau peraturan yang telah dibuat, dengan begitu masalah terkait kemiskinan akan segera dapat diatasi. Selain itu, pemerintah

wajib membuat program-program yang tujuan utamanya adalah untuk perbaikan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Program terkait pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program yang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi sendiri menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia harus semakin menurun dan jika memungkinkan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Indonesia nol persen atau hilang (Adji et al., 2022:1). Target nol persen tersebut tentu bukan suatu hal yang mudah untuk dicapai, mengingat kondisi masyarakat Indonesia saat ini seperti apa. Namun persoalan terkait pengentasan kemiskinan harus selalu menjadi problem yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar setidaknya selalu mengalami penurunan yang signifikan.

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bank Dunia dalam laporannya berjudul “Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security” mencatat hingga tahun 2022 angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sejumlah 1,5 % (The World Bank, 2023:6). Hal tersebut memberi harapan bahwa tujuan pemerintah Indonesia untuk memberantas kemiskinan akan lebih cepat dari target yang diharapkan tahun 2024. Sedangkan data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36% mengalami penurunan 0,21 % dari September 2022 dan menurun 0,18% dari Maret 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal tersebut tentu tidak luput dari suksesnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penurunan tingkat kemiskinan tersebut juga berhasil dilakukan karena menggandeng

seluruh lini sektor seperti kampus, lembaga riset, LSM, Organisasi Sosial Masyarakat, Komunitas Warga, Ekonomi Kreatif dan tentunya Pemerintah itu sendiri.

Menjelang akhir tahun 2023, program-program yang sebelumnya dirancang guna pengentasan kemiskinan sudah dilakukan. Program-program tersebut tentu ditujukan langsung untuk kesejahteraan masyarakat yang biasanya masuk dalam kelompok miskin. Adapun program-program dari pemerintah untuk pengentasan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan yang antara lain adalah pemberian jaminan sosial, bantuan sosial, subsidi tepat sasaran, pelatihan kewirausahaan, beasiswa pendidikan, renovasi rumah tidak layak huni, serta perbaikan sanitasi dan lingkungan (Adji et al., 2022:3). Selain itu, pemerintah juga berupaya mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan, peningkatan keterampilan masyarakat melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan komplementaritas program (Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke- 78 RI Tahun 2023, 2023:5-13).

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya berjalan kurang efektif dalam menjangkau kelompok miskin oleh karenanya pemerintah membuat kebijakan dalam merespon permasalahan tersebut dengan melakukan penajaman sasaran penerimaan manfaat melalui pengembangan data P3KE (Pensasaran, Percepatan, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Selain itu, pemerintah juga melakukan pemusatan program dan anggaran dalam rangka mengentaskan kemiskinan yakni dengan melalui penyesuaian APBN, APBD dan APBDes (Adji et al., 2022:1).

Penurunan angka kemiskinan dapat dilakukan dengan 3 hal yakni; Pertama, memaksimalkan dana intensif untuk memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dan yang terpenting adalah kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakatnya seperti dengan diadakannya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan. Kedua, memastikan target penerimaan bantuan menggunakan program P3KE dapat sesuai target dan sasaran. Ketiga, mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antar semua lini sektor seperti kementerian, lembaga, pemda, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri.

Dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha mengentaskan kemiskinan, maka dapat diketahui pula bagaimana pentingnya peran pemerintah dalam hal ini. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan yakni dengan membuat program-program yang sekiranya dapat secara signifikan menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam pengawasan apakah program yang telah dibuat tersebut telah berjalan sesuai rencana atau belum dan pemerintah juga berperan untuk memastikan apakah manfaat dari program yang dibuat telah benar-benar dirasakan oleh masyarakatnya ataukah belum.

Kebijakan serta upaya-upaya pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan tersebut merupakan sebuah langkah dan peran tanggungjawab yang diberikan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Terjaganya stabilitas ekonomi dan tersedianya segala kebutuhan masyarakatnya baik itu kebutuhan dasar maupun kebutuhan ekonomi merupakan salah satu kewajiban negara. Kebijakan dan

langkah pemerintah dalam penerapan program-program di atas merupakan sebuah terobosan yang bagus untuk pengentasan kemiskinan. Hal tersebut selaras dengan prinsip utama ekonomi Islam, yakni;

1. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Salah satu wujud dari tercerminnya sifat ketuhanan adalah dengan mewujudkan sifat tersebut dalam aspek kemanusiaan. Dalam hal ini peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan yang telah dibuat merupakan sebuah wujud aktualisasi dari sifat ketuhanan itu sendiri. Pemerintah berperan dalam memastikan sebisa mungkin masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, nilai ketuhanan dalam ekonomi Islam dapat tercermin dalam kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Bidang ekonomi merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena itu dalam pelaksanaannya juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan.

2. Al- Adl (Keadilan)

Program pemberian bantuan menggunakan data P3KE merupakan salah satu wujud peran pemerintah dalam usaha mengentaskan kemiskinan dan tentunya hal tersebut telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena diadakannya P3KE membuat penerima bantuan tepat sasaran dan sesuai target sehingga aspek keadilan dalam hal ini dapat terpenuhi. Dengan penggunaan data P3KE akan meminimalisir adanya kesalahan dalam pemberian bantuan yang mana akan membuat masyarakat yang seharusnya lebih layak menerima merasa tidak adil. Sejatinya pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menegakkan keadilan bagi semua rakyatnya (Haneef, 2010:139).

3. Nubuwah (Kenabian)

Perwujudan dari prinsip ekonomi Islam yakni tercerminnya sifat keNabian yang dapat dilihat dari perilaku Jujur dalam mengemban amanah, bertanggungjawab terhadap segala yang dilakukan, cerdas ketika membuat solusi dan menciptakan kerjasama serta komunikasi yang baik dalam menentukan sebuah kebijakan. Kebijakan serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam usaha mengentaskan kemiskinan di Indonesia merupakan manifestasi dari sifat kenabian dalam bidang ekonomi.

4. Khilafah (Pemerintahan)

Pemerintah berfungsi sebagai pengayom, pendisiplin dan penentu arah kebijakan yang tentunya dapat memberi manfaat bagi masyarakatnya. Dalam usaha mengentaskan kemiskinan, pemerintah Indonesia memiliki tanggungjawab dalam mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi karena hal tersebut merupakan salah satu fungsi dari berdirinya pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa prinsip pemerintahan dalam ekonomi Islam ini ditujukan untuk mengendalikan arah kebijakan yang dapat membawa kebermanfaatan bagi seluruh warga.

5. Ma'ad (Hasil)

Dijalankannya kebijakan dan program-program pemerintah dalam usaha mengentaskan kemiskinan tersebut merupakan sebuah perwujudan atas pertanggungjawaban pemerintah dalam hal menjaga atau mewujudkan amanah yang sebelumnya telah diberikan masyarakat kepadanya. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang kelima yakni ma'ad yang berarti kembali bahwa segala yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT.

Tantangan dan hambatan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan

Dalam pelaksanaan program maupun kebijakan pemerintah dalam usaha mengentaskan kemiskinan di Indonesia tentu tidak berjalan secara mulus tanpa adanya tantangan dan hambatan di dalamnya. Tentu hal ini tidak dapat dihindari oleh masing-masing negara dalam pelaksanaan setiap kebijakan. Adapun tantangan hambatan yang membuat problem kemiskinan tidak segera hilang dari Negara Indonesia antara lain adalah;

1. Terbatasnya dana yang dialokasikan guna mengentaskan kemiskinan membuat program-program tidak berjalan dengan lancar atau terhambat. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan juga merupakan salah satu penghambat pengentasan kemiskinan. Keterbatasan infrastruktur dapat pula menghambat aktivitas perekonomian negara. Pasalnya ketika aksesnya susah maka seseorang akan enggan melakukan aktivitas ekonomi. Hal ini juga akan menjadi pertimbangan para investor-investor yang akan investasi ke suatu negara atau perusahaan.
2. Terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Pasalnya ketika jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan pelamar kerja akan mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat dan hal tersebut tentu juga akan membuat tingkat kemiskinan meningkat pula. Ini juga menjadi salah satu tantangan pemerintah untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan agar pengangguran berkurang dan angka kemiskinan dapat menurun.

3. Sistem pengelolaan data kemiskinan untuk pengelolaan dana kemiskinan belum secara maksimal terintegrasi ke desa-desa. Hal ini tentu menjadi salah satu kendala, sebab dapat mengakibatkan bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Sebagaimana prinsip Al-Adl (Keadilan) dalam ekonomi Islam, hal ini perlu segera ditangani oleh pemerintah agar prinsip keadilan tersebut dapat terpenuhi. Meskipun program penajaman P3KE (Pensasaran, Percepatan, Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) sudah dilakukan, namun hal tersebut haruslah tetap dikawal hingga sampai pada daerah-daerah terpencil yang kesusahan akses.
4. Masyarakat yang enggan peduli terhadap program-program pemerintah yang biasanya melibatkan masyarakat membuat pengentasan kemiskinan menjadi terkendala. Pengentasan kemiskinan bukan merupakan tugas dari pemerintah saja namun masyarakat juga harus ikut berpartisipasi penuh dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan ikut berkontribusi ataupun ikut mendukung setiap kebijakan pemerintah maka hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Meskipun dengan adanya tantangan dan hambatan tersebut dapat mengganggu proses pengentasan kemiskinan, namun bukan berarti tidak dapat ditangani atau diselesaikan. Pemerintah selalu punya cara untuk menghadapi tantangan dan hambatan tersebut. Berbagai upaya dan usaha terus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kerjasama antar berbagai elemen dalam sebuah negara juga harus berjalan dengan baik. Tidak hanya pemerintah saja selaku pembuat kebijakan yang memiliki

peran penting dalam mengentaskan kemiskinan, namun masyarakat juga harus berkontribusi di dalamnya dengan mendukung setiap program kerja yang didesain secara khusus oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Kunci dari terentaskannya kemiskinan di suatu daerah adalah adanya kejasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah seperti penajaman program P3KE (Pensasaran, Percepatan, Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) serta pemusatan program dan anggaran tersebut sudah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yakni: (1) Tauhid (KeEsaan Tuhan) dalam hal ini peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan merupakan sebuah wujud aktualisasi dari sifat ketuhanan itu sendiri. (2) Al-Adl (Keadilan) dalam hal ini program P3KE (Pensasaran, Percepatan, Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) adalah wujud dari keadilan itu sendiri. (3) Nubuwwah (Kenabian) dalam hal ini konsistensi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dan amanah seperti sifat Nabi. (4) Khilafah (Pemerintahan), dalam hal ini untuk mengendalikan arah kebijakan yang dapat membawa kebermanfaatan bagi seluruh warga menjadi salah satu prinsip dari pemerintahan dalam hal ekonomi Islam, (5) Ma'ad (Hasil) Dijalankannya kebijakan dan program-program pemerintah dalam usaha mengentaskan kemiskinan tersebut merupakan sebuah perwujudan atas pertanggungjawaban pemerintah dalam hal menjaga amanah yang sebelumnya telah diberikan masyarakat kepadanya. Salah satu hambatan yang membuat problem kemiskinan tidak segera hilang dari negara

Indonesia antara lain adalah; Terbatasnya dana yang dialokasikan guna mengentaskan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, terbatasnya lapangan pekerjaan, sistem pengelolaan data kemiskinan untuk pengelolaan dana kemiskinan belum secara maksimal terintegrasi ke desa-desa, dan masyarakat yang enggan peduli terhadap program-program pemerintah.

REFERENSI

- Adji, A., Asmanto, P., Nugroho, D., Chamami, A., Nugroho, W. S., Syarifah, Z. A., Ahmad, M., Fadhillah, E., Handayani, N. B., Rahmawati, E., Widyastuti, L., & Tohari, A. (2022). Pemingkatan Kesejahteraan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). TNP2K.
- Adlan, M. A. (2021). Peran Pemerintah dalam menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Era Pandemi Covid-19 (Sebuah Kajian dalam Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 08(01), 81–104. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3552>
- Badan Pusat Statistik. (2023, February 12). Profil Kemiskinan di Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*. PT Raja Grafindo Persada.
- Herlina, N., & Komariah, M. (2017). Peran Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 05(02), 260–277.
- <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i2.821>
- Johan, A. (2009). *Etika Bisnis Islami*. Walisongo Press.
- Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke- 78 RI Tahun 2023. (n.d.).
- Mukhtar. (2013). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Referensi.
- Sulastomo. (2011). *Sistem Jaminan Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sumud. (2018). Peranan Pemerintah dalam Menyejahterakan Masyarakat melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Amwal*, 10(02), 215–228. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3565>
- The World Bank. (2023). *Indonesian Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security*. The World Bank Group.
- Umaima. (2014). Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Ekonomi Islam). *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 12(02), 179–185. <https://doi.org/10.35905/diktum.v12i2.213>
- Zed, M. (2009). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.